



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 1, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 02/01/2025
 Reviewed : 05/01/2025
 Accepted : 05/01/2025
 Published : 17/01/2025

Temo Sukma Ayu¹
 Nurul Fatmawati²
 Tarasyifa Ardhayazeta
 Nathahiella Putri³
 Febrianti Putri Fatias⁴
 Mohamad Djasuli⁵

IMPLIKASI ANTARA KERANGKA KONSEPTUAL DENGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (LRA & LO) PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (DISPARBUD) JAWA TIMUR 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi antara kerangka konseptual dengan laporan keuangan pemerintah (LRA & LO) pada Dinas sektor pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Timur 2022. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur review dari berbagai jurnal publish yang terkait dengan penelitian ini serta PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran 1 terkait SAP berbasis Akrual. Data laporan keuangan yang dianalisis yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan terdapat implikasi atas kedua laporan tersebut (LRA dan LO), LRA mengungkapkan rincian mengenai alokasi anggaran, realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan sejalan dengan persyaratan akuntansi berbasis akrual. LO menyajikan rincian pendapatan, pengeluaran, dan kelebihan/defisit yang komprehensif dan konsisten. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa ada implikasi yang kuat antara kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022

Kata Kunci: Kerangka Konseptual, Disparbud, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional

Abstract

This study aims to analyze the implications between the conceptual framework and government financial reports (LRA & LO) at the East Java Tourism and Culture Sector Office (Disparbud) in 2022. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Research data were collected through a literature review study of various published journals related to this study and PP 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards Appendix 1 related to Accrual-based SAP. The financial report data analyzed were the Budget Realization Report and Operational Report of the East Java Tourism and Culture Office in 2022. The results of the study show that there are implications for both reports (LRA and LO), LRA reveals details regarding budget allocation, revenue realization, expenditures, transfers, and financing in line with accrual-based accounting requirements. LO presents comprehensive and consistent details of revenue, expenditure, and excess/deficit. This clearly shows that there are strong implications between the conceptual framework of government accounting and the Budget Realization Report of the East Java Tourism and Culture Office in 2022

Keywords: Conceptual Framework, Disparbud, Budget Realization Report, Operational Report

PENDAHULUAN

Perekonomian Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata, dimana sektor ini berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan lokal dan penciptaan lapangan kerja baru. Akibatnya, mengelola sektor pariwisata dengan benar sangat penting. Laporan keuangan

^{1,2,3,4,5} Universitas Trunojoyo Madura
 email:temo@gmail.com

pemerintah adalah alat yang dapat digunakan untuk mengelola sektor pariwisata dengan baik. Laporan ini harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan berdasarkan kerangka konseptual yang jelas.

Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik (KKA SP) yang diterbitkan oleh BPK Republik Indonesia merupakan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. KKA SP memberikan panduan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal tentang entitas publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan landasan fundamental yang mengarahkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan di sektor publik. Dalam konteks sektor publik, kerangka konseptual ini memainkan peran kritis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan sumber daya publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan panduan utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Kerangka ini menyediakan dasar teoretis dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan adalah relevan, andal, konsisten, dan dapat dibandingkan. Implikasinya sangat signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah, karena kerangka konseptual mengarahkan bagaimana transaksi keuangan dicatat, diklasifikasikan, dan dilaporkan. Dengan adanya kerangka ini, laporan keuangan pemerintah dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, kerangka konseptual membantu memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengurangi risiko kesalahan dan ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan. Secara keseluruhan, kerangka konseptual akuntansi sektor publik berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan integritas laporan keuangan pemerintah, yang pada akhirnya mendukung pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif dan efisien.

KKA SP membantu sektor pariwisata Jawa Timur dengan memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga kinerja keuangan dan penggunaan sumber daya dapat digambarkan dengan jelas. Kerangka ini tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan. Dengan menggunakan kerangka konseptual ini, laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai alat yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan tentang manajemen sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat, dapat menggunakan informasi yang dihasilkan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran, merencanakan kebijakan yang akan datang, dan menemukan area mana yang perlu diperbaiki. Selain itu, kepatuhan terhadap KKA SP menurunkan risiko kesalahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah karena laporan keuangan pemerintah memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Penerapan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik (KKA SP) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sangat penting untuk pengelolaan keuangan sektor publik, terutama di sektor pariwisata Jawa Timur. KKA SP tidak hanya memberikan pedoman teoretis, tetapi juga menetapkan dasar untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat relevan, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penerapan KKA SP dan SAP secara konsisten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan membuat pengelolaan sumber daya publik lebih transparan dan lebih adil. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dapat memaksimalkan pertumbuhan sektor pariwisata dan menarik investor dan masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan memiliki laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur dapat melakukan evaluasi kinerja yang lebih efisien, menemukan area mana yang perlu diperbaiki, dan merencanakan kebijakan yang lebih efisien. Selain itu, integrasi KKA SP dan SAP dalam penyusunan laporan keuangan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah karena mengurangi kesalahan dan ketidakakuratan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, efisien, dan berkelanjutan di sektor pariwisata Jawa Timur, adalah penting untuk menerapkan kerangka konseptual akuntansi sektor publik yang tepat dan sesuai standar.

Studi sebelumnya telah meneliti hubungan antara kerangka konseptual dan laporan keuangan pemerintah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerangka konseptual memberikan panduan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal. Laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kerangka konseptual dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan entitas publik. Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan entitas publik. Dalam penelitian ini kami akan menganalisis implikasi antara kerangka konseptual dan laporan keuangan pemerintah pada sektor pariwisata dengan mengambil kasus Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional Disparbud Jawa Timur 2022.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian yang dikumpulkan melalui studi literatur review dari berbagai jurnal publish yang terkait dengan penelitian ini serta PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran 1 terkait SAP berbasis Akrua. Data laporan keuangan yang dianalisis yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022. Kemudian dari data yang ada kami analisis apakah terdapat implikasi antara Kerangka Konseptual dengan laporan keuangan dari Disparbud Jawa Timur tersebut serta apakah Disparbud sudah menerapkan kerangka konseptual dalam penyusunan dan penyajian atas laporan keuangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata adalah salah satu sektor yang penting dalam sistem perekonomian Indonesia termasuk Jawa Timur. Secara global sektor pariwisata ini diperkirakan akan mengalami pertumbuhan terus menerus meskipun didalam kondisi ekonomi dan sosial yang tidak pasti. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata memberikan peningkatan kontribusi pada perekonomian yang signifikan. Sehingga sektor pariwisata memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan lapangan pekerjaan. Oleh karena hal itu, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan sektor pariwisata secara efektif dan akuntabel.

Laporan keuangan pemerintah berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan tanggung jawab pemerintah. Mereka juga berfungsi sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban manajemen keuangan untuk entitas baik di sektor publik maupun swasta. Kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memastikan penyediaan informasi keuangan yang jelas dan dapat dipahami untuk pengambilan keputusan di masa depan oleh pengguna. Laporan keuangan yang memenuhi syarat harus memiliki karakteristik kualitatif yang memadai. Sebagaimana diuraikan dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif ini merupakan tolak ukur yang harus dipatuhi dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, laporan keuangan perlu mencakup empat karakteristik kualitatif: 1) relevansi, menunjukkan bahwa laporan keuangan harus menawarkan informasi yang komprehensif dan tepat waktu dengan umpan balik yang mampu mempengaruhi keputusan pengguna mengenai peristiwa masa lalu atau saat ini; 2) keandalan, menunjukkan bahwa laporan keuangan harus transparan dan tanpa informasi yang menyesatkan; 3) dapat dipahami, menandakan bahwa laporan keuangan harus mudah dipahami dan disesuaikan dengan kendala pengguna; dan 4) dapat dibandingkan, menyiratkan bahwa laporan keuangan menjadi berharga ketika mereka dapat disandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas lain. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). LRA mengungkapkan realisasi anggaran pemerintah, sementara LO menggambarkan kinerja operasi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah berdiri sebagai panduan utama dalam merumuskan dan menyajikan laporan keuangan di sektor publik.

Kerangka konseptual laporan keuangan pemerintah bertindak sebagai peta jalan dalam menyusun pernyataan tersebut. Kerangka kerja ini menggambarkan komponen laporan keuangan pemerintah dan bagaimana komponen-komponen ini harus dinilai dan diungkapkan. Unsur-unsur kerangka konseptual ini meliputi: 1) Aset, yang merupakan sumber daya ekonomi

yang dikelola dan/atau dimiliki oleh pemerintah karena kejadian masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diantisipasi untuk diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dan dapat dikuantifikasi dalam unit moneter, mencakup sumber daya nonkeuangan yang penting untuk penyediaan layanan publik dan sumber daya yang dipertahankan untuk motif sejarah dan budaya; 2) Kewajiban, yang timbul dari peristiwa masa lalu yang mengarah pada arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 3) Ekuitas, mewakili kekayaan bersih pemerintah sebagai perbedaan antara aset dan liabilitasnya. 4) Pendapatan, dengan pendapatan LRA, semua penerimaan ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Neraca Anggaran Lebih banyak di tahun anggaran terkait dan tidak memerlukan pembayaran pemerintah, sedangkan pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai dorongan terhadap ekuitas selama periode pelaporan; 5) Pengeluaran, mewujudkan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah Neraca Anggaran Lebih banyak di tahun anggaran dan tidak diharapkan dipulihkan oleh pemerintah. 6) Arus kas, menandakan arus kas masuk dan keluar, dan setara kas di Bendahara Umum Negara/Regional. (BPK, 2010)

Laporan keuangan utama terdiri dari berbagai komponen, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menawarkan pandangan komprehensif tentang sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, merinci perbandingan antara anggaran dan angka aktual. LRA mencakup pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan. Selain itu, neraca menggambarkan status keuangan aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan arus kas berfokus pada kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran. Ini melacak dana pemerintah dari saldo awal melalui pengumpulan, pengeluaran, hingga saldo akhir. Selanjutnya, serangkaian laporan keuangan memberikan penjelasan naratif rinci tentang angka-angka dalam laporan tersebut, termasuk informasi tentang kebijakan akuntansi dan rincian penting lainnya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah wajib selama penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Kerangka peraturan ini memiliki otoritas hukum dan dirancang untuk meningkatkan akurasi dan keandalan informasi keuangan yang disebarluaskan oleh badan-badan pemerintah, baik secara terpusat maupun regional. Penerapan SAP yang konsisten diyakini secara luas dapat meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan pemerintah dengan memfasilitasi penyediaan data keuangan yang lebih tepat, transparan, dan dapat dilacak yang dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk proses pengambilan keputusan pemerintah. Pada studi sebelumnya yang dilakukan oleh Erna pada tahun 2020, berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan," menyoroti dampak dan korelasi yang signifikan antara SAP dan kualitas laporan keuangan dalam ranah administrasi publik. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAP yang efektif siap untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

Implikasi antara kerangka konseptual dengan laporan keuangan pemerintah (LRA & LO)

Kerangka konseptual merupakan komponen penting dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah LRA & LO. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang dapat membantu pengambilan keputusan pengguna, kerangka konseptual yang digunakan. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami akan menganalisis apakah laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022 (LRA & LO) terdapat implikasi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Berikut merupakan data Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Timur tahun 2022 dan 2021.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Disparbud Jawa Timur 2022 dan 2021



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Ref.	2022			2021
			APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH		1.381.000.000,00	1.868.372.551,00	135,29	3.115.308.277,00
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.381.000.000,00	1.868.372.551,00	135,29	3.115.308.277,00
4102	Retribusi Daerah		1.347.719.000,00	1.574.939.000,00	116,86	506.414.000,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah		33.281.000,00	293.433.551,00	881,68	2.608.894.277,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.381.000.000,00	1.868.372.551,00	135,29	3.115.308.277,00
5	BELANJA DAERAH		143.829.764.386,00	137.851.092.706,00	95,84	101.075.799.657,00
51	BELANJA OPERASI		141.549.417.285,00	135.597.025.901,00	95,79	96.263.298.133,00
5101	Belanja Pegawai		39.692.105.000,00	37.367.125.658,00	94,14	37.299.398.154,00
5102	Belanja Barang dan Jasa		89.922.535.285,00	87.034.274.243,00	96,79	54.593.671.979,00
5105	Belanja Hibah		11.934.777.000,00	11.195.626.000,00	93,81	4.370.228.000,00
52	BELANJA MODAL		2.280.347.101,00	2.254.066.805,00	98,85	4.812.501.524,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.345.174.156,00	1.329.065.926,00	98,80	1.822.659.650,00
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		564.572.945,00	557.424.379,00	98,73	2.525.772.774,00
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	190.499.100,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		370.600.000,00	367.576.500,00	99,18	273.570.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH		143.829.764.386,00	137.851.092.706,00	95,84	101.075.799.657,00
	SURPLUS/(DEFISIT) – LRA		(142.448.764.386,00)	(135.982.720.155,00)	95,46	(97.960.491.380,00)
	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(142.448.764.386,00)	(135.982.720.155,00)	95,46	(97.960.491.380,00)

Sumber: (Ii et al., n.d.)

Tabel 2. Laporan Operasional Disparbud Jawa Timur 2022 dan 2021

No.	Uraian	Ref.	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	PENDAPATAN DAERAH-LO		1.819.668.097,00	63.617.333.651,00	(61.797.665.554,00)	(97,14)
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		1.819.668.097,00	3.176.512.731,00	(1.356.844.634,00)	(42,71)
1102	Retribusi Daerah-LO		1.558.339.000,00	535.514.000,00	1.022.825.000,00	191,00
1104	Lain-lain PAD yang Sah-LO		261.329.097,00	2.640.998.731,00	(2.379.669.634,00)	(90,10)
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0,00	60.440.820.920,00	(60.440.820.920,00)	(100,00)
1301	Pendapatan Hibah-LO		0,00	60.440.820.920,00	(60.440.820.920,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO		1.819.668.097,00	63.617.333.651,00	(61.797.665.554,00)	(97,14)
2	BEBAN DAERAH		143.221.944.138,96	101.958.348.876,63	41.263.595.262,33	40,47
21	BEBAN OPERASI		135.584.991.873,96	96.368.528.585,63	39.216.463.288,33	40,69
2101	Beban Pegawai		37.367.125.658,00	37.299.398.154,00	67.727.504,00	0,18
2102	Beban Barang dan Jasa		87.022.240.215,96	54.698.902.431,63	32.323.337.784,33	59,09
210201	Beban Barang		12.196.696.677,96	9.080.435.161,63	3.116.261.516,33	34,32
210202	Beban Jasa		51.433.767.914,00	34.309.623.931,00	17.124.143.983,00	49,91
210203	Beban Pemeliharaan		9.106.031.323,00	3.961.074.614,00	5.144.956.709,00	129,89
210204	Beban Perjalanan Dinas		12.535.240.051,00	6.347.268.725,00	6.187.971.326,00	97,49
210205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		1.750.504.250,00	1.000.500.000,00	750.004.250,00	74,96
2105	Beban Hibah		11.195.626.000,00	4.370.228.000,00	6.825.398.000,00	156,18
22	Beban Penyusutan dan Amortisasi		7.638.952.265,00	5.589.820.291,00	2.047.131.974,00	36,82
2201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		3.736.096.568,00	3.029.769.366,00	706.327.202,00	23,31
2202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		2.478.949.658,00	1.679.029.882,00	799.919.776,00	47,64
2203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		993.699.084,00	212.979.408,00	780.719.676,00	366,57
2204	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	39.537.650,00	(39.537.650,00)	(100,00)
2206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		428.206.955,00	628.503.985,00	(200.297.030,00)	(31,87)
24	BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	-
2401	Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH BEBAN DAERAH		143.221.944.138,96	101.958.348.876,63	41.263.595.262,33	40,47
	SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL		(141.402.276.041,96)	(38.341.015.225,63)	(103.061.260.816,33)	268,80

No.	Uraian	Ref.	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	PENDAPATAN DAERAH-LO		1.819.668.097,00	63.617.333.651,00	(61.797.665.554,00)	(97,14)
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		1.819.668.097,00	3.176.512.731,00	(1.356.844.634,00)	(42,71)
1102	Retribusi Daerah-LO		1.558.339.000,00	535.514.000,00	1.022.825.000,00	191,00
1104	Lain-lain PAD yang Sah-LO		261.329.097,00	2.640.998.731,00	(2.379.669.634,00)	(90,10)
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0,00	60.440.820.920,00	(60.440.820.920,00)	(100,00)
1301	Pendapatan Hibah-LO		0,00	60.440.820.920,00	(60.440.820.920,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO		1.819.668.097,00	63.617.333.651,00	(61.797.665.554,00)	(97,14)
2	BEBAN DAERAH		143.221.944.138,96	101.958.348.876,63	41.263.595.262,33	40,47
21	BEBAN OPERASI		135.584.991.873,96	96.368.528.585,63	39.216.463.288,33	40,69
2101	Beban Pegawai		37.367.125.658,00	37.299.398.154,00	67.727.504,00	0,18
2102	Beban Barang dan Jasa		87.022.240.215,96	54.698.902.431,63	32.323.337.784,33	59,09
210201	Beban Barang		12.196.696.677,96	9.080.435.161,63	3.116.261.516,33	34,32
210202	Beban Jasa		51.433.767.914,00	34.309.623.931,00	17.124.143.983,00	49,91
210203	Beban Pemeliharaan		9.106.031.323,00	3.961.074.614,00	5.144.956.709,00	129,89
210204	Beban Perjalanan Dinas		12.535.240.051,00	6.347.268.725,00	6.187.971.326,00	97,49
210205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		1.750.504.250,00	1.000.500.000,00	750.004.250,00	74,96
2105	Beban Hibah		11.195.626.000,00	4.370.228.000,00	6.825.398.000,00	156,18
22	Beban Penyusutan dan Amortisasi		7.636.952.265,00	5.589.820.291,00	2.047.131.974,00	36,62
2201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		3.736.096.568,00	3.029.769.366,00	706.327.202,00	23,31
2202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		2.478.949.658,00	1.679.029.882,00	799.919.776,00	47,64
2203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		993.699.084,00	212.979.408,00	780.719.676,00	366,57
2204	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	39.537.650,00	(39.537.650,00)	(100,00)
2206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		428.206.955,00	628.503.985,00	(200.297.030,00)	(31,87)
24	BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	-
2401	Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH BEBAN DAERAH		143.221.944.138,96	101.958.348.876,63	41.263.595.262,33	40,47
	SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL		(141.402.276.041,96)	(38.341.015.225,63)	(103.061.260.816,33)	268,80

Sumber: (Ii et al., n.d.)

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Semua laporan tersebut dapat dikatakan berkualitas apabila dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila dalam penyusunannya menggunakan pedoman kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Namun pada analisis kali ini kami hanya akan menggunakan dua laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional untuk mengetahui apakah dalam laporan keuangan pemerintah Disparbud Jawa Timur sudah menggunakan kerangka konseptual sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangannya sehingga terdapat implikasi antara keduanya.

Laporan Realisasi Anggaran

Dalam LRA tersebut menunjukkan bahwa target pendapatan sebesar Rp. 1.381.000.000,00, dan realisasi pendapatan yang didapatkan sebesar Rp. 1.868.372.551,00. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur telah mampu meningkatkan pendapatan lebih dari 135% dari target yang ditetapkan. Selain itu LRA ini juga menunjukkan rincian belanjanya selama satu periode dengan total yang dianggarkan sebesar Rp. 143.829.764.386,00 namun pada akhirnya hanya terealisasi sebesar Rp. 142.448.764.386,00. Sehingga pada periode ini pemerintah sudah menghemat anggaran belanja sebesar 95,84%. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah LRA ini telah memenuhi persyaratan akuntansi berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Lampiran I (SAP Berbasis Akrual). LRA ini dapat dikatakan terdapat implikasi dengan kerangka konseptual, karena telah memberikan informasi tentang anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Selain itu, LRA Disparbud Jawa Timur ini juga menunjukkan pencapaian kinerja yang lebih baik yang terlihat dari kemampuannya dalam melakukan peningkatan pendapatan lebih dari target yang ditetapkan serta mampu melakukan penghematan belanja.

Laporan Operasional

Laporan Operasional menunjukkan bahwa pendapatan operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 senilai Rp 63.617.333.651,00, turun menjadi Rp 1.819.668.097,00 pada tahun 2022, mencerminkan penurunan pendapatan 97,14%. Selanjutnya, pengeluaran daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2022 sebesar Rp. 143.221.944,138,96, meliputi berbagai biaya operasional dan non operasional. Defisit besar dalam kegiatan non-operasional sebesar Rp 620.363.062,00 mengakibatkan total defisit operasi sebesar Rp 142.022.639.190,96. Defisit ini terutama berasal dari defisit non-operasional yang jauh lebih besar dibandingkan dengan surplus non-operasional. Meskipun defisit kegiatan nonoperasional lebih kecil sebesar Rp 620.362.062,00, tidak ada surplus non-operasional yang berkontribusi terhadap laporan operasional Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Surplus yang tidak mencukupi sebesar Rp 5.500.000,00 gagal mengimbangi defisit non-operasional yang signifikan. Dokumen ini menekankan kekurangan yang signifikan di semua klasifikasi, yang berasal dari kegiatan non-operasional dan surplus keseluruhan (atau defisit) - LO. Defisit ini terutama dipengaruhi oleh beban non-operasional yang substansial, dengan surplus non-operasional kecil gagal mengimbangi beban ini. Entri penting tidak berdampak karena tidak ada pendapatan atau pengeluaran luar biasa yang dicatat. Akibatnya, diperlukan analisis yang lebih komprehensif oleh pemerintah untuk menentukan penyebab defisit signifikan dalam Laporan Operasional Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan di Jawa Timur, bersama dengan mengusulkan strategi untuk mengurangi defisit tersebut. Sementara Laporan Operasional ini memenuhi tuntutan akuntansi berbasis akrual dalam kerangka konseptual pemerintah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi pemerintah sangat penting. Oleh karena itu, ada korelasi antara laporan operasional dan kerangka konseptual pemerintah, karena laporan dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dengan cermat menyajikan informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan surplus daerah, menunjukkan pendekatan pelaporan yang konsisten.

Ada beberapa opsi yang dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur lebih sesuai dengan ketentuan dan standar yang diterapkan dalam kerangka konseptual dan aturan yang berlaku. Pertama, staf keuangan harus dilatih untuk memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelatihan harus mencakup teknik pencatatan akrual, pemahaman tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik, dan praktik terbaik dalam pelaporan keuangan pemerintah. Kedua, meningkatkan sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan benar dan tepat waktu. Ini mencakup penerapan prosedur audit internal yang ketat, yang memungkinkan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam pencatatan keuangan sebelum laporan keuangan dibuat. Pengendalian internal yang baik juga melibatkan pemisahan tugas yang jelas, verifikasi independen, dan pengawasan terus menerus terhadap proses kegiatan. Ketiga, pelaporan keuangan yang lebih efisien dan akurat dapat dicapai melalui penggunaan teknologi informasi. Sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dapat membantu dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan secara otomatis dan konsisten. Sistem ini juga dapat menyediakan laporan keuangan dalam waktu nyata, yang memungkinkan manajemen untuk melakukan pemantauan dan analisis secara lebih efektif. Keempat, lebih banyak transparansi dan lebih banyak komunikasi dengan pemangku kepentingan. Ini dapat dicapai melalui penyusunan laporan keuangan yang lebih rinci dan mudah dipahami serta penyediaan ringkasan eksekutif yang menjelaskan kinerja operasional dan keuangan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal independen dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keandalan dan akurasi laporan tersebut. Dengan beberapa langkah-langkah ini, pemerintah dapat mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang berlaku.

SIMPULAN

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang didasarkan pada kerangka teoritis membawa banyak implikasi signifikan. Ini termasuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan pemerintah, memastikan konsistensi dan komparabilitas laporan keuangan di berbagai periode dan entitas, memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan informasi melalui penyediaan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang untuk mengurangi risiko hukuman, dan meningkatkan efisiensi proses pelaporan keuangan dan pemanfaatan teknologi. Intinya, kepatuhan terhadap SAP meningkatkan transparansi, tanggung jawab, dan efisiensi dalam pengawasan keuangan pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur untuk tahun 2022 menggambarkan implikasi yang selaras dengan dasar-dasar teoritis akuntansi pemerintah. Ini mengungkapkan rincian mengenai alokasi anggaran dan realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan sejalan dengan persyaratan akuntansi berbasis akrual. Demikian pula, Laporan Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022 menunjukkan implikasi sejalan dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah dengan menyajikan rincian pendapatan, pengeluaran, dan kelebihan/defisit yang komprehensif dan konsisten. Meskipun ada defisit penting dalam Pernyataan Operasional, situasi ini tidak membahayakan kepatuhan dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Sebaliknya, ini menggaris bawahi pentingnya mematuhi prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi pemerintah dalam persiapan laporan keuangan di masa depan.

Sangat jelas bahwa ada korelasi yang kuat antara kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022. Pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta realisasi anggaran dibahas secara menyeluruh dalam laporan ini. Informasi ini disajikan sesuai dengan standar akuntansi berbasis akrual, yang memastikan pelaporan keuangan yang jelas dan akurat. Ini menunjukkan komitmen organisasi terhadap praktik akuntansi yang tepat dan tujuan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Selain itu, Laporan Operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022 menyajikan informasi yang rinci dan konsisten tentang pendapatan, beban, dan surplus atau defisit. Dengan penyajian yang mendetail, laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja operasional dinas tersebut, sehingga pemangku kepentingan dapat membuat penilaian yang lebih akurat tentang operasionalnya. Meskipun Laporan Operasional mengalami kekurangan yang signifikan, hal ini tidak mengurangi kepatuhan terhadap kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Selain menunjukkan bahwa ada masalah dalam pengelolaan keuangan, defisit tersebut juga membuka peluang untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam penyusunan laporan keuangan selanjutnya, penting bagi dinas tersebut untuk mempertimbangkan prinsip dasar dan tujuan akuntansi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk secara konsisten meningkatkan kinerja keuangan dan operasional.

Secara keseluruhan, laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2022 telah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang kondisi keuangan dan operasional dinas. Dinas ini dapat memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dengan tetap mengikuti standar akuntansi pemerintah. Evaluasi defisit saat ini dapat digunakan ke depannya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan mencapai tujuan pembangunan pariwisata dan kebudayaan yang berkelanjutan di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahiroh, G. (2019). Analisis Hubungan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Universitas Brawijaya Malang
- BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Erna. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Health Sains*, 1(5), 527–537. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i5.99>
- BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Eperna, A., Salim, F. F., Chinda, L., Rohaizat, P. S., & Stevania, W. (2021). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020. *Jurnal Sosial Sains*, 1(6), 535–544. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i6.128>
- Ii, I., Iv, I., Vi, V., Isi, D., Tabel, D., Gambar, D., Lampiran, D., Pengantar, K., Jawab, P. T., Anggaran, L. R., Operasional, L., Ekuitas, L. P., Atas, C., Keuangan, L., Belakang, L., Dan, M., Penyusunan, T., Keuangan, L., Hukum, L., ... Pengukuran, B. (n.d.). No Title.
- Nugraeni, & Budiantara, M. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 18–32.
- Putri, F. R., Vhatika, I., Yanto, H., Zukhrufa, N., & Panorama, M. (2019). The Influence Of Tourism On Economic Growth In Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, 8(2), 1–11.
- Sutrisno, S., & Astuti, I. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Siber Dan Sandi Negara. *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 18(2), 185–198. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v18i2.532>